

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak atas upah yang layak, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, hak untuk beristirahat, serta hak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan sejahtera bagi pekerja, dengan memastikan bahwa perusahaan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pengawasan dan penegakan hukum juga penting untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan ini. Meskipun sudah ada regulasi yang jelas, masih ada tantangan dalam implementasi di lapangan, seperti dalam hal pengawasan dan penegakan hak-hak pekerja, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
2. Pertanggungjawaban perdata mencakup kewajiban perusahaan untuk mengganti kerugian atau memenuhi hak yang belum dipenuhi, seperti pembayaran upah yang tertunda atau hak-hak sosial yang tidak diberikan. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana bisa diterapkan jika perusahaan melanggar ketentuan keselamatan kerja atau melakukan diskriminasi. Selain itu, perusahaan yang tidak mematuhi hak pekerja akan menghadapi dampak reputasi yang buruk, yang dapat mengganggu stabilitas perusahaan dan hubungan dengan pekerja. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami kewajiban hukum mereka dan memastikan hak-hak pekerja dipenuhi demi menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif.

B. Saran

1. Penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait hak-hak pekerja, terutama di sektor-sektor yang rentan, seperti UMKM. Sosialisasi mengenai hak-hak pekerja juga perlu diperluas, sehingga pekerja lebih memahami hak-hak mereka dan dapat menuntut keadilan jika hak mereka dilanggar.
2. Perusahaan harus lebih proaktif dalam memastikan pemenuhan hak-hak pekerja, baik dalam hal upah, keselamatan, maupun jaminan sosial. Pengusaha juga perlu meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan pekerja untuk mencegah potensi pelanggaran. Selain itu, peningkatan pelatihan bagi manajemen terkait hukum ketenagakerjaan akan membantu meminimalkan risiko pelanggaran hukum.